

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu pentingnya perdagangan internasional bagi suatu negara hingga melahirkan persaingan yang begitu sengit. Sebagaimana biasanya, dampak yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan perdagangan pada akhirnya merupakan bentuk persaingan. Bahkan pandangan historis memberikan pernyataan yang lebih ekstrim, bahwa perdagangan sangat terkait dengan penaklukan wilayah.¹ Hubungan dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang merupakan salah satu contoh kasus.

Demikian awal hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang melalui persaingan antara negara-negara Eropa dan juga melalui penaklukan wilayah. Demikian hubungan dagang yang terjadi di masa modern diliputi dengan pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat. Kesediaan Amerika Serikat untuk mendukung pertahanan Jepang merupakan salah satu keuntungan jangka panjang bagi Jepang dalam membangun industri dan teknologi Jepang. Karena secara otomatis Jepang tidak perlu mengeluarkan anggaran pertahanan yang terlalu besar dan bisa dialokasikan bagi pembangunan sektor yang lain. Akan tetapi hal ini berakibat jangka panjang terhadap sektor ekonomi dan dan perdagangan Amerika Serikat.

¹lihat, Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

Sebagaimana peran politik Amerika Serikat di Jepang yang sangat kuat, dalam bidang perdagangan, Jepang dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat menarik untuk dicermati, terlebih pada masa kepresidenan Bill Clinton yang menyangkut sensitifitas defisit neraca perdagangan yang berjalan mulai pada tahun 1965-an untuk kemudian lebih mengemuka pada tahun 1971-an.

Hingga dasawarsa 60-an, nilai impor dan ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat berkisar antara 4–5%. Dan tahun 1970-an nilai tersebut mulai meningkat secara tajam. Ekspor meningkat dari sekitar 5% di tahun 1960-an dari tahun 1980 dan 10,7% di tahun 1992. Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan internasional menjadi semakin penting bagi Amerika Serikat, yaitu bahwa Amerika Serikat semakin tergantung pada sektor perdagangan internasional atau perdagangan global.² Meskipun hal ini masih bersifat relatif Indikasinya adalah bahwa biaya proteksi di Amerika Serikat kalau dihitung sebagai prosentase terhadap pendapatan nasional masih dalam kategori relatif kecil.³ Namun fakta diatas dapat dipakai sebagai indikator bahwa perdagangan internasional menjadi bertambah penting bagi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.

² Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta, 1997, hal. 4

³ relatif disini dalam artian bahwa Amerika Serikat bisa saja menarik diri perdagangan internasional dan masih dapat bertahan tanpa penurunan drastis standar hidup masyarakatnya, yang hal ini tidak berlaku bagi negara lain seperti Jepang, Jerman, Yunani dan Italia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda-beda antara lain: tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan tingkat teknologi yang tinggi.

Sejak 1970, kedudukan perdagangan Jepang terhadap Amerika Serikat telah meningkat dengan mantap. Sejak awal tahun 1970, surplus perdagangan Jepang dengan Amerika Serikat (berdasar variabel ekspor-impor) hampir mencapai USD 3,2 milyar dolar. Defisit perdagangan yang sangat besar ini menjadi sumber perselisihan politik terbesar antara Amerika Serikat dan Jepang.⁴

Puncaknya adalah ketika ekspor impor Amerika Serikat mengalami penurunan antara tahun 1972-1980, tepatnya ketika krisis minyak melanda dunia akibat embargo dari negara-negara OPEC. Bagi pihak Amerika Serikat, minyak merupakan komoditi impor terbesar, yang mengalami kecenderungan peningkatan tajam setiap tahun. Kemudian pada pertengahan 1980-an defisit perdagangan Amerika Serikat meningkat tajam, terlebih dengan Jepang. Dari keseluruhan defisit Amerika Serikat yang mencapai USD 148 milyar dolar pada tahun 1986, USD 54 milyar dolar diantaranya adalah defisit terhadap Jepang, yang hal ini sangat kontras dengan eksportnya ke Jepang yang hanya mencapai 36,5% seluruh ekspor Amerika Serikat.⁵

Dari banyak pangsa pasar Amerika Serikat yang sudah dikuasai Jepang salah satunya adalah sektor otomotif. Demikian keberhasilan luar biasa industri mobil Jepang menjadikan Jepang sebagai produsen mobil terbesar di dunia. Sementara

⁴ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, Jilid II, Erlangga, Jakarta, 1997, hal. 85

⁵ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional, Persepsi Nasional*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 123

Amerika Serikat menderita kerugian yang terburuk sepanjang sejarah otomotif hingga mendekati USD 5 milyar dolar.⁶

Sebagaimana dikatakan oleh Krugman “negara-negara yang mendominasi perdagangan makin mirip dalam teknologi dan sumber daya, kerap keunggulan komparatif di dalam suatu industri itu menjadi samar”,⁷ pendapat lain mengatakan bahwa dalam lingkungan yang sangat kompetitif, keunggulan komparatif tidak lagi tetap; keunggulan itu bisa diciptakan oleh pemerintah maupun perusahaan.⁸

Hingga masa kepresidenan Clinton, interaksi perdagangan yang terjadi diantara kedua negara mencapai total USD 180 milyar dolar. Dengan tingkat *trade deficits* meningkat setiap tahunnya yang dialami oleh Amerika Serikat, defisit perdagangan Amerika terhadap Jepang pada tahun 1993 mencapai angka USD 6,3 milyar untuk kemudian semakin meningkat mencapai USD 65,7 milyar pada tahun 1994.⁹ Angka tersebut belum menunjukkan defisit perdagangannya dengan negara yang lainya. Sehingga Jepang menjadi partner dagang Amerika Serikat yang utama setelah Canada, dan juga menjadi negara penyumbang defisit perdagangan Amerika Serikat yang sangat besar.

⁶ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 271

⁷ Paul Krugman, *Perdagangan Internasional, Konsep dan Kebijakan*, 171

⁸ Mochtar Mas' oed, *Perdagangan dalam perspektif ekonomi politik internasional*, FISIPOL UGM, 1998, hal. 22

⁹ Op. Cit., Dominick Salvatore

B. Perumusan Masalah

Dalam kajian perdagangan internasional selalu diwarnai oleh adanya polarisasi; yaitu konflik dan kerjasama. Meskipun volume perdagangan dunia selalu meningkat, hal ini tidak serta merta memunculkan harmonisasi hubungan perdagangan. Demikian tingkat interaksi ekonomi yang relatif kecil tidak berarti konflik. Sehingga menarik untuk mengkaji tentang : Bagaimana pemerintahan Bill Clinton (1993-2001) mengelola defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang ?

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Diplomasi

Diplomasi biasanya dipakai oleh suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Diplomasi dalam artian lebih dekat diplomasi sebagai alat komunikasi.¹² Demikian diplomasi diarahkan untuk memaksimalkan/meningkatkan pencapaian kepentingan nasional.

Diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani “ Diploun” yang berarti melipat. Konsep ini menunjukkan pada semua dokumen resmi negara yang diceetak pada piringan logam dobel dan dilipat. Konsep diplomasi ini kemudian meluas hingga menyangkut perjanjian-perjanjian dengan bangsa lain, termasuk berkembang di masa modern menjadi manajemen hubungan internasional.¹³

¹² John T. Rourke, Mark A. Boyer, *International Politics On The World Stage*, (Brief edition), Brown & benchmark, Connecticut, 1996, hal 260

¹³ S. L. Bay, *Diplomasi Dan Geografi Bangsa-Bangsa*, Jakarta, 1984, hal. 1

Diplomasi, oleh The Chamber's Twentieth Century Dictionary, Diplomasi diartikan sebagai "*The art of negotiation, especially of treaties between states; political skill*" (Seni berunding khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara; keahlian politik).¹⁴ Menurut Harold Nicholson, Diplomasi mencakup 5 hal : 1) Politik luar negeri 2) Negosiasi 3) Mekanisme pelaksanaan 4) Cabang dinas luar negeri. Dengan kerangka 5 hal tersebut, Nicholson kemudian menginterpretasikan lebih jauh bahwa diplomasi mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional bahkan dalam arti yang buruk mencakup tindakan licik.¹⁵ Sedangkan Muldoon mendefinisikan diplomasi sebagai metode yang digunakan oleh negara bangsa, melalui lembaga yang berwenang untuk mengadakan hubungan timbal balik (mutual relations). Berkomunikasi dengan yang lain dan juga untuk melangsungkan kerjasama politik, ekonomi dan hukum.¹⁶

Dengan demikian S.L. Roy mendefinisikan :

"Diplomasi yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata dengan cara untuk mencapai tujuan-tujuannya".¹⁷

Sebagai sebuah proses komunikasi diplomasi mempunyai 3 elemen penting : Negosiasi, Pertanda dan Diplomasi Publik. Negosiasi dapat terjadi ketika dua atau lebih aktor berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Baik itu dilakukan secara

¹⁴ *Ibid.* hal. 2

¹⁵ *Ibid.* hal 3

¹⁶ James D. Muldoon, *International Diplomacy And The United Nations*, The Law, Washington, D.C.

langsung maupun tidak langsung (lewat perantara). Pertama menunjuk pada perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk mengirim pesan kepada pemerintah lain. Sedangkan Diplomasi Publik merupakan pergeseran model komunikasi tradisional antar pemerintah.¹⁸ Sedangkan cara-cara yang digunakan menurut Morgenthau ada tiga : Persuasi, Kompromi dan Ancaman Kekuatan.¹⁹

Meskipun tinjauan politik sering dijadikan pertimbangan utama dalam khazanah diplomasi, akan tetapi seiring dengan bergesernya wacana hubungan internasional dimulai dengan berakhirnya perang dingin, diplomasi mengemban misi baru yaitu misi diplomasi ekonomi dalam bentuk yang lebih spesifik adalah perdagangan. Babak ini dimulai semenjak semakin intensifnya wacana ekonomi dan perdagangan internasional dalam studi maupun praktek diplomasi modern. Bahkan diplomasi multilateral pun semakin didominasi oleh isu-isu ekonomi dan perdagangan internasional.

Dengan semakin besarnya perdagangan dua arah yang terjadi, agenda perdagangan internasional sekarang yang berada di bawah kontrol WTO bergerak semakin cepat. Sehingga isu perdagangan mampu menggeser peranan isu-isu yang pada masa lalu berada pada lingkup domestik atau minimal tidak berhubungan dengan perdagangan internasional.²⁰ Sebagai gantinya misi-misi diplomasi dititikberatkan pada isu-isu yang sifatnya non-ideologis seperti ekonomi dan

¹⁸ John T. Rourke, Mark A. Boyer

¹⁹ Morgenthau, Hans J., *Politik Antar Bangsa* (edisi 3), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991

²⁰ James P. Muldoon, Jr., et. al., *Multilateral Diplomacy and The United Nations Today*, Westview Press, Colorado, 1999, hal. 88

perdagangan internasional. Sejak berakhirnya perang dingin maka isu-isu diplomasi berada pada seputaran ketergantungan ekonomi dan sengketa dagang.

Nicholson berpendapat tentang diplomasi bahwa penyelesaian kompromistis antara mereka yang berselisih melalui negosiasi pada umumnya menguntungkan daripada penghancuran total musuh-musuh. Karena melalui negosiasi dan persetujuan untuk saling memberi konsesi, maka beberapa pengertian kokoh akan dapat dicapai.²¹ Dan dengan sarana diplomasi pula sanksi dan reward ekonomi perdagangan dapat dilaksanakan.

Demikian dengan berdirinya institusi-institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi dan perdagangan, maka peran diplomasi dianggap semakin penting dalam upaya menjembatani konflik-konflik dagang yang terjadi antara negara-negara di dunia, tanpa mereduksi peran negosiasi bilateral. Sebagaimana penyelesaian atas sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Jepang yang berlarut-larut dan tak kunjung berakhir. Keretakan yang terjadi diantara keduanya semakin menampakkan peningkatan eskalasi konflik. Terlebih pada masa kepemimpinan Bill Clinton, dimana Clinton sangat intens menekan Jepang agar dapat membantu menyeimbangkan neraca perdagangan luar negerinya.

Hal ini sebagai komitmen presiden Clinton terhadap pembangunan sektor ekonomi perdagangan Amerika Serikat. Meskipun Clinton tampak proteksionis dan *Inward Looking* akan tetapi tetap tidak melupakan pencapaian tujuan dalam negeri

Diantaranya dibentuk "framework for a new trade relationship with Japan,"²² yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Perdana Menteri Jepang Miyazawa pada tanggal 10 Juli 1993. Berikutnya pada tanggal 11 Februari 1994, terjadi kesepakatan antara Bill Clinton dengan Perdana Menteri Jepang Hosokawa, dalam rangka membentuk "Framework negotiations".

Kemudian pada tanggal 24 Mei 1994, terjadi pertemuan antara Bill Clinton dan Perdana Menteri Hata dalam rangka pembicaraan tentang kerangka kerja. Dan bulan Juni 1994, terjadi pertemuan antara kelompok kerja dalam sektor-sektor utama di Washington, D.C. dan di Tokyo. kemudian adalah kesepakatan tentang "Enhanced Initiative on Deregulation and Competition Policy", hingga kira-kira pada masa kepemimpinan Clinton telah terbentuk lebih dari 20 *Agreement* dengan Jepang. dan ini merupakan prestasi sangat luar biasa dalam upaya pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bill Clinton untuk menyeimbangkan neraca perdagangannya.

Kemudian tindak lanjut dari Framework tersebut adalah dilaksanakannya IPR agreement, yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 1994 oleh Sekretaris perdagangan Amerika Serikat Ron Brown dan dari pihak Jepang diwakili oleh Duta Besar Takakazu Kuriyama yang dilanjutkan pada tanggal 20 Januari 1994 sebagai tindak lanjut dari *Framework Agreement* sebelumnya. Sehingga dari beberapa contoh indikator-indikator agreement yang terjadi tersebut. Dan ini menjadi bukti kuat akan kesungguhan dari pemerintah Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Bill Clinton

untuk mengatasi defisit perdagangannya dengan negara lain yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dari masa sebelumnya. Dalam artian bahwa tampak efektifitas dari dilakukannya berbagai perundingan tersebut.

Efektifitas kesepakatan tersebut dapat dilihat dari kerangka tersebut yang telah menghasilkan banyak kesepakatan antara Amerika Serikat dan Jepang. Dalam agenda kebijakan perdagangan Clinton tahun 1996 dan laporan tahunan pada tahun 1995 Clinton mengungkapkan tentang keberhasilan pencapaiannya dalam orientasi akhir dari kesepakatan yang telah menghasilkan hasil yang nyata dimana setidaknya-tidaknya Clinton telah mencapai 20 *Agreement* dengan Jepang. Dan perundingan tersebut telah memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Salah satu indikatornya adalah naiknya ekspor Amerika Serikat ke Jepang lebih dari 34% dalam kurun waktu tiga tahun. Contoh dari keberhasilan dalam kesepakatan perdagangan yang pernah terjadi adalah perundingan uruguay.²³

Pasca mendirikan *Framework agreement* tersebut Clinton kemudian berinisiatif dalam mendirikan "*Enhanced Initiative on Deregulation and Competition Policy*." Pada kesepakatan ini, lebih berkonsentrasi pada deregulasi terhadap pasaran Jepang terhadap produk Amerika dalam bentuk yang lebih spesifik,²⁴ Jepang sering mengalami tuduhan dari pihak Amerika Serikat terhadap proteksionisme pasarnya.

²³ <http://www.jetro.go.jp/usa/newyork/inside/io960506.html#1>

²⁴ <http://www.iaa.org/Archive/IFIP/07/0705u2.html>

Hal ini terjadi karena Amerika Serikat merasa terancam oleh posisi kuat Jepang, baik ancaman terhadap pasar dalam negeri maupun pasar luar negerinya. Karena bagaimanapun juga bahwa Jepang juga menjadi pasar yang sangat prospektif bagi produk-produk dari Amerika Serikat.

Dengan demikian Clinton harus berusaha keras untuk membuat penyesuaian neraca perdagangannya dengan Jepang sebagai negara penyumbang defisit tetap terhadap Amerika yang sangat besar, dengan jalan mengadakan pembaruan kesepakatan-kesepakatan yang pernah berlaku. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagi Amerika Serikat adalah menaikkan tingkat proteksi guna melindungi industri dalam negerinya. Meskipun efektifitas berlakunya kebijakan proteksionis belum sepenuhnya memecahkan kebuntuan tersebut. Dan hal ini sama halnya dengan memutar kembali roda globalisasi mundur ke arah yang berlawanan, yang seperti dulu Amerika Serikat sangat kencang menyuarakannya di pentas internasional dengan slogannya yang terkenal; *Laisses faire*.

2. Teori Merkantilis

Dalam literatur ekonomi, gagasan Teori Merkantilisme muncul dari tulisan Jean Baptiste Colbert dan Freidrich list. Merkantilisme atau nasionalisme ekonomi atau proteksionisme, merupakan kosa kata yang sama untuk menunjuk pada kebijakan industri yang didasarkan pada intervensi negara yang sangat kuat. Merkantilisme

dalam bentuk modern seringkali berubah nama menjadi Neo-Merkantilisme atau Nasionalisme Ekonomi.

Merkantilisme menjadi sangat populer bagi pemerintahan yang sedang melakukan pembangunan kekuatan negara dengan melakukan pengintegrasian antara ekonomi dan politik. Sehingga lebih dikenal dengan *Political Economy of State Building*. Hingga pada masa ini, pandangan kaum maupun teori Merkantilisme tentang kemakmuran bangsa (*national wealth*) tercermin dalam upaya mengakumulasi kepemilikan kapital yang sebanyak-banyaknya. Kalau upaya akumulasi tidak cukup dilakukan didalam negeri, perdagangan internasional digalakkan sebagai sarana perjuangan mencapai kepentingan nasional.²⁵

Pemahaman atas Teori Merkantilisme terletak pada tingkat proteksi terhadap pasar dalam negeri, dimana proteksi akan berdampak pada meningkatnya restriksi perdagangan antar negara. Demikian bahwa fokus perhatian pada teori ini adalah perdagangan luar negeri.

Demi memperoleh surplus sebanyak mungkin dari perdagangan internasional yang bersifat konfliktual, maka pemerintah negara harus mengembangkan kebijaksanaan “nasionalisme ekonomi” yaitu :

1. Menerapkan pengendalian harga dan upah buruh sehingga barang yang dihasilkan bias di jual dengan harga bersaing dipasaran internasional.
2. Menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor.

3. Menggalakkan ekspor barang manufaktur dan membatasi impor hanya untuk komoditi pasar.²⁶

Dengan demikian penekanan Teori Merkantilis pada perdagangan internasional terletak pada kesempatan surplus penerimaan dalam neraca transaksi berjalan (current account). Setiap ekspor adalah baik. Dan sebaliknya set'ap impor adalah buruk. Sebagaimana seorang pedagang menjual lebih banyak dari yang ia beli. Sehingga pencapaian positif atas *trade balance* secara ekonomis dan politis akan menguntungkan suatu negara dan akan berdampak pada perubahan angka ekspor dan impor.²⁷ Oleh karena itu kegiatan ekspor merupakan lokomotif utama melalui peningkatan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan impor. Sedangkan impor merupakan saingan yang dapat menurunkan permintaan terhadap produk industri lokal yang dihasilkan di dalam negeri.

Oleh karena demikian, Merkantilisme berpendapat bahwa kegiatan produksi dalam negeri dan ekspor harus dijadikan prioritas, yaitu melalui rangsangan subsidi dan fasilitas dari pemerintah. Sebaliknya impor harus dibatasi melalui hambatan yang bersifat proteksi. Khususnya untuk industri strategis yang memang memerlukan perlindungan.²⁸ “Membiarkan pasar bebas berlaku, sementara posisi sendiri lemah, hanya akan menghancurkan diri sendiri”.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dennis R. Appleyard, Alfred J Field Jr. *International Economics, Trade Theory, and Policy*, The Mc GrawHill Companies, Singapore, 1998 19-20.

²⁸ Drs. Hendra Halwani, M.A., Dr. Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 10

²⁹ Moehjar Mo'oad, *Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Karena tidak semua negara mempunyai surplus ekspor dalam waktu yang bersamaan, maka suatu negara hanya dapat memperoleh keuntungan atas pengorbanan negara lain. Dan yang berlaku disini adalah Zero-Sum-Game.³⁰

Dalam prakteknya para penganut merkantilisme menganjurkan atas kontrol pemerintah yang ketat terhadap perdagangan dan mencoba menunjukkan bahwa tujuan dari negara-negara pada dasarnya bertentangan dan juga mengusulkan nasionalisme ekonomi. Dalam bentuk yang agak halus dan terselubung beberapa dari pandangan ini berkembang dalam bentuk Neo-Merkantilisme.³¹

Indikasi atas praktek perdagangan internasional yang didominasi oleh negara-negara dagang utama menunjukkan akan adanya kesesuaian dengan Teori Merkantilisme. Ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang sedikit banyak berasal dari sumbangan Teori Merkantilisme. Arah perdagangan yang difokuskan pada kebijaksanaan surplus perdagangan atau orientasi ekspor menjadi indikasi kuat atas praktek merkantilisme.

Pandangan Amerika Serikat terhadap buruknya asumsi negatif (-) dalam neraca transaksi berjalan merupakan indikasi kuat atas berkembangnya merkantilisme Amerika Serikat. Sebagaimana kuatnya proteksionisme dan nasionalisme ekonomi yang semakin kentara. Munculnya aturan-aturan baik yang spesifik maupun tidak terhadap Jepang merupakan upaya massif Amerika Serikat untuk mengeksport defisit perdagangan ke Jepang. Bukti atas pencapaian 20-an Agreements dengan Jepang dan

³⁰ Dunning, *Substance of International Trade*, London, 1990, hal. 2

F. Metode Penelitian

Demi efisiensi dan efektifitas waktu dan biaya dan juga tanpa mengurangi nilai/bobot dalam pembahasan ini, maka studi ini didasarkan pada studi literatur tanpa membatasi bentuk karya referensi. Termasuk dari media elektronik ataupun media cetak, jurnal ilmiah, situs internet dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Secara mendasar bahwa tulisan ini mengansung lima bab; diantaranya:

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi, Alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, Hipotesa, Kerangka konseptual, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Mengulas tentang pandangan terhadap hubungan dagang dalam tinjauan perdagangan internasional. Demikian juga sejarah hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang.

BAB III. Membahas tentang dinamika hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang. Termasuk mengenai defisit yang dialami oleh Amerika Serikat dan kompetisi dagang Amerika Serikat dengan Jepang di pasaran internasional.

BAB IV. Lebih intens mengulas tentang upaya-upaya kedua negara dalam meresolusi konflik dagang tersebut. Termasuk tindakan nyata yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

BAB V. Kesimpulan